

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu mengambil peran aktif dalam Pembangunan diwilayahnya (Kusmana & Garis 2019). Salah satau aspek yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah perekonomian, karena perekonomian yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran (Riyansyah et al., 2018). Dalam upaya untuk meningkatkan perekonoian masyarakat desa, diperlukan pendampingan yang baik dari pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pemberdayaan ekonomi (Tanan & Dhamayanti,2020).

Sejak kemerdekaannya, indonesia telah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan masyarakat tersebut sekarang menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar terkait kesejahteraan tersebut. Kemiskinan telah menjadi masalah yang signifikan bagi Indonesia. Faktor-faktor yang membentuk kemiskinan sangt kompleks, menurut para ahli. Aksesibilitas kesehatan dan air bersih yang buruk, padatnya pemukiman kumuh, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah adalah beberapa indikator yang dapat menunjukkan dimensi tersebut. Dalam jurnal Lisnawati Sopiah et al, (2023). Kemiskinan tidak hanya berarti tidak mampu dalam hal perekonomian, tetapi juga berarti gagal memenuhi hak asasi manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang berbeda. Menurut Manurung et al., (2015) dalam jurnal Lisnawati Sopiah et al, (2023).

Dengan Statusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus kehidupan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawabuntuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial untuk memenuhi keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia, undang-undang yang sangat baik yang dibuat oleh pemerintah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya apa yang terjadi dilapangan saat ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Banyak penduduk indonesia saat ini hidup dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemiskinan sangat sulit didefinisikan karena merupakan konsep yang sangat relatif. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak berani memberikan definisi yang jelas tentang apa itu kemiskinan (Usman, 2019).

Kemiskinan di Indonesia nampaknya menjadi permasalahan yang tidak pernah berakhir. Besaran jumlah penduduk Indonesia mendorong pemerintah untuk aktif mengimplementasikan program-program bantuan dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Sejak zaman Presiden Soekarno hingga era Presiden Jokowi, pemerintah telah melaksanakan berbagai jenis insiatif bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai salah satu contohnya.

Program Keluarga Harapan merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta PKH dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku yang lebih baik melalui pemberian bantuan dengan syarat-syarat tertentu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan menjalankan peran sebagai sebuah pelindung sosial terhadap masyarakat miskin. Bantuan tunai yang diterima melalui PKH ini turut mendorong tingkat konsumsi di masyarakat. Jadi secara tidak langsung, pelaksanaan KPM turut mendorong perputaran roda ekonomi dari sisi konsumsi. Pada dasarnya bantuan PKH banyak digunakan dengan tidak baik. Permasalahannya banyak bantuan sosial yang disalahgunakan, misalnya untuk bayar hutang. Bantuan PKH untuk keperluan pendidikan atau kehidupan keluarga.

Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola keuangan.

Menurut Beni Ahmad (2016), pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan, melalui Kementerian Sosial. Dinas Sosial, salah satu lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang sosial, menjalankan program ini dengan tujuan membangun sistem perlindungan sosial untuk orang miskin di Indonesia.

Program PKH berusaha untuk mengubah perilaku hidup rumah tangga yang sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, program ini dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan. Meskipun demikian, penerimanya berharap bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berusia sekolah SD-SMA lebih sering pergi ke sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak balita. Menurut data dari Buku Laporan Program Keluarga Harapan Tahun 2023, ada 263 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH di Desa Linggawangi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai kondisi pendidikan anak-anak Keluarga Penerima Manfaat di Desa Linggawangi menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yang disebabkan oleh motivasi dari orang tua masih kurang belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan hasil capaian cara mendidik anak terhadap pendidikan. Selanjutnya mengenai masalah besaran bantuan yang diterima oleh keluarga penerima, dari hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Linggawangi, mendapat informasi bahwa Keluarga Penerima PKH mendapat berupa tunai yang diberikan sekali, dalam dua bulan sekali. Dana bantuan yang besaran minimalnya berbeda dari Rp. 150.000 samapai dengan Rp. 500.000, tergantung jumlah anggota Keluarga Penerima PKH.

Pemanfaatan dana bantuan terhadap pendidikan KPM PKH sangat penting karena tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran, pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan pendidikan. Dengan adanya kesadaran dan motivasi orang tua terhadap anak, diharapkan KPM PKH dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka

sehingga mereka dapat bekerja sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial PKH. Namun, upaya untuk memahami kebutuhan pendirian. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi seberapa efektif KPM memanfaatkan dana bantuan. Peneliti ini dapat membantu cara dan strategi yang lebih baik untuk memanfaatkan dana bantuan pendidikan. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi seberapa efektif program pemanfaatan dana bantuan tersebut.

Pada tahun 2023 Desa Linggawangi terdaftar sebagai penerima bantuan PKH masyarakat dan harus melewati proses administratif untuk mendapatkan data seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain. Menghambat proses program pemerintah, membuat beberapa keluarga penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan PKH sesuai dengan tujuannya. Penerima bantuan PKH tersebar di banyak dusun di Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di bawah ini.

Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 diantaranya ada 5 dusun yaitu, Dusun I (Dusun Bolodog) jumlah peneriman PKH ada 56 orang, Dusun II (Dusun Kalieung) jumlah penerima PKH ada 70 orang, Dusun III (Dusun Parigi) jumlah penerima PKH ada 67 orang, Dusun IV (Dusun Sindangraja) jumlah penerima PKH ada 44 orang, dan Dusun V (Dusun Tegal Munding) jumlah penerima PKH ada 26 orang.

Permasalahan laporan hasil data penduduk di Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari lima dusun yang masing-masing menerima 263 orang penerima bantuan PKH dengan yang tersebar di Dusun II (Kalieung) dan paling sedikit Dusun IV Sindangraja. Bantuan PKH seharusnya membiayai pendidikan anak, ibu hamil dan balita serta pemeriksaan kesehatan rutin diposyandu, tetapi masih ada keluarga yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Uang bantuan PKH seharusnya digunakan untuk pendidikan dan pemeriksaan kesehatan. Namun digunakan untuk membayar hutang, membeli mainan anak, perangkat seluler, membeli peralatan rumah tangga, membeli kendaraan dan sebagainya.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana proses pemanfaatan dana terhadap pendidikan yang telah

dilakukan oleh KPM (keluarga penerima manfaat) dalam upaya mengetahui kebutuhan pendidikan keluarga. Dengan judul penelitian **“Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah berikut dapat diidentifikasi sebagai terkait dengan penelitian ini:

- 1) Keluarga penerima bantuan PKH belum memenuhi keperluan rumah tangga.
- 2) Pemanfaatan bantuan PKH digunakan tidak sesuai dengan tujuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan.
- 3) Masih adanya anak yang putus sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikannya khususnya Keluarga Penerima Manfaat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dirumuskan masalah adalah **Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan di Desa Linggawangi?**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana bantuan program keluarga harapan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dunia pendidikan masyarakat, khususnya mengenai pendidikan di keluarga.
- 2) Untuk menjadi bahan perbandingan, pertimbangan dan pengembangan pada penelitian dimasa mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, sebagai pelajaran untuk menambah pengetahuan dalam bidang penelitian ini. Dengan melakukan penelitian ini akan mengetahui secara langsung bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana bantuan PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di desa linggawangi.
- 2) Bagi keluarga penerima manfaat (KPM), sebagai motivasi untuk lebih efektif lagi memanfaatkan dana bantuan untuk kepentingan pendidikan.
- 3) Bagi pemerintah daerah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya dalam meningkatkan kesadaran keluarga penerima manfaat PKH.

1.5.3 Kegunaan Empiris

Penelitian ini secara empiris dapat membantu Keluarga Penerima Manfaat untuk memahami kesadaran terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana bantuan, khususnya pada Keluarga Penerima Manfaat.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses dimana individu, kelompok, atau komunitas memperoleh kontrol, kekuatan, dan akses terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam pemberdayaan yang dimaksud disini proses dimana KPM di Desa Linggawangi diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengelola dan memanfaatkan dana bantuan secara efektif dan efisien.

1.6.2 Dana Bantuan PKH

Dana bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang rentan terhadap resiko sosial. Dapat dikatakan bahwa dana bantuan mendatangkan keuntungan kepada

suatu pihak. Dalam pemanfaatan dana bantuan disini, di masukan untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

1.6.3 Kebutuhan Pendidikan

Kebutuhan Pendidikan digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana pendidikan menjadi kebutuhan bagi individu dan masyarakat. Kebutuhan Pendidikan disini dalam memenuhi bantuan biaya sekolah dan penggunaan dana bantuan diantaranya, untuk membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, biaya tranfortasi ke sekolah, dan kebutuhan pendidikan lainnya.